



**PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**

Nomor : 0626/D.II/P/BPR-EB/IV/2021  
Lamp. : 1 (satu) set

Magetan, 30 April 2021

Kepada Yth :


Ketua DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR  
Di Rumah Perbarindo Komp. Patra II No. 46  
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR "EKADHARMA BHINARAHARJA"  
Tahun Laporan 2020

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun Pelaporan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Pengantar BPR tentang Laporan GCG kepada OJK
2. Resi Pengiriman Laporan GCG ke OJK
3. Laporan GCG Tahun 2020 (Cover dan Isi Laporan GCG Lengkap)

Demikian kami sampaikan, mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat  
"EKADHARMA BHINARAHARJA" ✓  
Kawedanan - Magetan  
Direksi  
  
DWIATMODJO BAHAGIO, SP  
Direktur

Tembusan :

1. Arsip

*Aman - Mudah - Bertambah*

Nomor : 0591/D.I/P/BPR-EB/IV/2021

Magetan, 26 April 2021

Lamp : 1 (satu) Set

Kepada Yth :

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri

Di Jl. Brawijaya No. 3

Kediri

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR “EKADHARMA BHINARAHARJA”  
Tahun Laporan 2020

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK no 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun Pelaporan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR “EKADHARMA BHINARAHARJA” Tahun Laporan 2020
2. Tabulasi Hasil Penilaian Self Assessment PT. BPR “EKADHARMA BHINARAHARJA”
3. Faktor – Faktor Penilaian Self Assessment PT. BPR “EKADHARMA BHINARAHARJA”

Demikian agar maklum.

PT. BPR “EKADHARMA BHINARAHARJA”

Kawedanan – Magetan



MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE

Direktur Utama

Tembusan :

1. Arsip



KGP Express  
MAGETAN  
0

Origin  
MAGETAN(MGT)

Destination  
KEDIRI  
KDR

Service  
REGULER (S)

Shipment  
DOKUMEN

Pieces  
1

Weight  
1

Payment  
CREDIT

Handling  
GENERAL CARGO

Nomor Akun  
MGT305501

Referensi Pengirim

eKONOSEMEN



KGP1113484208



Penerima wajib memberikan Nama Jelas, Tanda Tangan, Tgl & Jam Diterimanya kiriman pada Konos ini dan Pengirim telah membaca, memahami dan sepakat untuk terikat dengan Syarat Pengiriman PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) yang tercantum dalam halaman lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah dalam konos ini.

**Shipper/Pengirim :**

BPR EKADHARMA BINARAHARJA  
JL RAYA JARANAN, NGADIREJO KAWEDANAN, MAGETAN

0  
0/0

**Attention :**

Description of Shipment/Keterangan Isi Kiriman :  
DOCUMENT

Special Instruction/Instruksi Khusus :  
NO.0591/D/P/BPR-EB/IV/2021 TANGGAL 29 APRIL 2021

Pickup By/Diambil oleh KGP Express :

Date/Tanggal : 29-04-2021 Time/Jam :

**Receiver/Penerima :**

KANTOR CJK KEDIRI  
JL BRAWIJAYA NO.3

KEDIRI  
KEDIRI 0  
0/0/0

**Attention :**

Shipper Signature & Stamp/Tanda Tangan & Stempel

Signature/Tanda Tangan

2/3 Penagihan Entry Date : 29-04-2021 15:00:00 by : Suparni

**Declare Value/Nilai Kiriman :**

**Price/Harga :**

Mata Uang : IDR  
Biaya Porto : 10,000.00  
Surcharge : 0.00  
PPN 1 % : 100.00  
Biaya Packing : 0.00  
Asuransi : 0.00  
Biaya Lain-lain : 0.00  
Total Jumlah : 10,100.00

WE CANNOT DELIVER TO P.O.BOX  
KAMI TIDAK DAPAT MENGANTAR  
KE KOTAK POS



# **LAPORAN**

## **PENERAPAN TATA KELOLA**

### **TAHUN 2020**



**PT BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**  
**KAWEDANAN – MAGETAN**  
**TAHUN 2021**



---

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020**

### **PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**

#### **I RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

##### **1 PENGERTIAN TATA KELOLA**

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja posisi 31-12-2020 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.165.375.380, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.17.888.909. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja selanjutnya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

##### **2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA**



Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR



- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum

### **4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali,



pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

## **2 Accountability**

- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system
- BPR harus meyakini bahwa masing masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders

## **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

## **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

## **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban

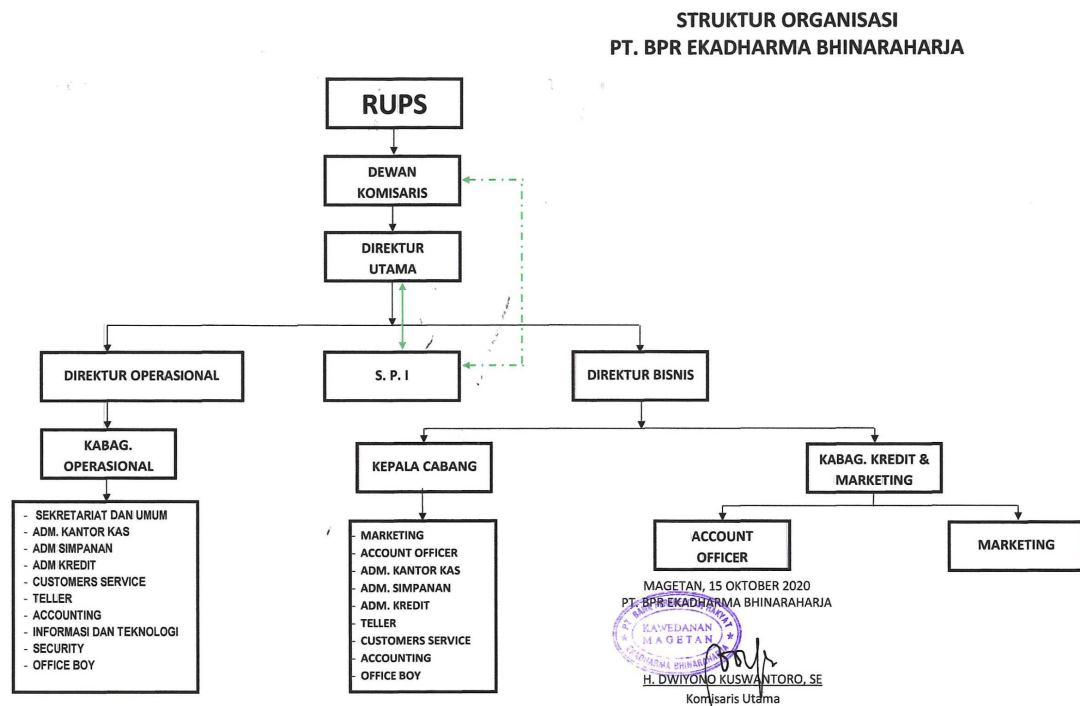




#### 4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

## II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA



## III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 131 tanggal 25 Nopember 2020 pada Notaris Eka sari Sulistyowati, SH.,M.Kn adalah sebagai berikut :



Nama : DWIATMODJO BAHAGIO, SP  
Jabatan : Direktur  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/2-12-1979  
Pendidikan Terakhir : S- 1 Pertanian Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Yogyakarta  
Lama Jabatan : 0 tahun  
Sertifikasi Direksi : 64127 1120 6 7019 2020  
Masalaku : 8-12-2025  
Pengalaman Kerja Terakhir : Kepala Cabang Utama PT. BPR Universitas Gadjah Mada



Nama : MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE  
Jabatan : Direktur Utama  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/4-12-1968  
Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi Manajemen Universitas Semarang  
Lama Jabatan : 0 tahun  
Sertifikasi Direksi : 64127 1120 6 3240 2018  
Masalaku : 21-12-2023  
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur Utama PT. BPR Nusumma Jawa Tengah

**Keterangan:**

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.



6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### **3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

### **4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
		PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP	Tidak Ada
2	MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE	Tidak Ada

### **5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :



#### 1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

#### 2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

#### IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

##### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Ekadharma Bhinaraharja per 31-12-2020 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.131 tanggal 25 Nopember 2020 pada Notaris Eka Sari Sulistyowati, SH.,M.Kn adalah sebagai berikut :



Nama : Drs. Hariyadi , MM  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul/15-4-1962  
Pendidikan Terakhir : S-2 Master in Finance Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Lama Jabatan : 0 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 3476 2019  
Masalaku : 23-1-2024  
Pengalaman Kerja Terakhir : Dewan Komisaris Independen PT BPR Bank Bantul





Nama	: H. Dwiyono Kuswantoro, SE
Jabatan	: Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir	: Klaten/18-11-1963
Pendidikan Terakhir	: S-1 Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lama Jabatan	: 0 tahun
Sertifikasi Komisaris	: 64127 1120 6 5718 2020
Masalaku	: 2-7-2025
Pengalaman Kerja Terakhir	: Komisaris Utama PT BPR Ekadharm Bhinaraharja

**Keterangan:**

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

**2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau



- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

**3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

**4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja
1	Drs. Hariyadi , MM	Tidak Ada
2	H. Dwiyono Kuswantoro, SE	23,5%

**5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2020 adalah sebagai berikut :

**1. HUBUNGAN KEUANGAN**

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Hariyadi , MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	H. Dwiyono Kuswantoro, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan



## 2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Hariyadi , MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	H. Dwiyono Kuswantoro, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Saudara Kandung

## V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja posisi 31-12-2020, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja adalah sebesar Rp.17.888.909, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

## VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 25 November 2020 adalah sebagai berikut :

### 1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	606.000
2	Tunjangan	2	64.366
3	Tantiem	2	91.825
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam	0	Kendaraan dinas, BPJS



	bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan		kesehatan dan tenaga kerja, perumahan
	<b>Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>762.191</b>

## 2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	396.000
2	Tunjangan	2	29.564
3	Tantiem	2	86.355
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	BPJS kesehatan dan tenaga kerja
	<b>Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>511.919</b>

## VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2020 di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4,93	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,81	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,06	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1,91	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,89	1,00





### VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2020 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIR-AN
1	Drs. Hariyadi , MM	Komisaris Utama	4	4	0	100%
2	H. Dwiyono Kuswantoro, SE	Komisaris	4	4	0	100%

#### Keterangan:

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

#### Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

1. Rencana Bisnis BPR
2. Isu-isu strategis BPR
3. Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

### IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2020 di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0



Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN**

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2020 yang terjadi di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0

**Keterangan:**

Permasalahan hukum perdata dalam proses penyelesaian kasus kredit Macet atas nama Sarjito dengan nomor rekening 31.93.049723.01 di Pengadilan Negeri Kab. Ponorogo , Bank Ekadharma turut tergugat dalam hal agunan SHM dengan lokasi di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

**XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

**Keterangan:**

Dalam tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan



## **XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

### **1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:**

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang



berhubungan dengan kegiatan usaha BPR

11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sampai dengan posisi 31-12-2020 antara lain :

- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait

#### **INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2020**

- Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

## **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL**

### **1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:**

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan





- meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

**Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sampai dengan posisi 31-12-2020 meliputi:**

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit terhadap proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

## **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik GANUNG AB sebagai Auditor PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR



untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2019	Drs. Henry & Sugeng	SPK01/GA/2019/XI/14/PST	14-11-2020 s.d. 4-3-2020	Terdaftar di OJK
2020	Ganung AB	378.02/SPK.EKB.01/GAB/XII/2020	16-12-2020 s.d. 16-2-2021	Terdaftar di OJK

### **3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO**

Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:

1. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
  1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
  3. Kecukupan proses dan system
  4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko stratejik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
3. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:**

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang



menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki

5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja mencakup:

1. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2. PE Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan/workshop/sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga lainnya.
3. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.

### **XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	0	0
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	0	0

**Keterangan:**

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja



#### **XIV RENCANA BISNIS BPR**

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

##### **RENCANA BISNIS PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA TAHUN 2021**

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
3. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

#### **XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

##### **1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

###### **1 Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

###### **2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan





dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

**3 Laporan Keuangan Bulanan**

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

**2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**

1. PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui website
2. Selain itu, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

**XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Donasi bencana alam	Bantuan rumah roboh puting beliung	3.000	Ibu Kinah Kelurahan Rejosari RT 02 RW 03 Kec Kawedanan Magetan
2	Bantuan untuk masjid dan Mushola	Pembangunan mushola	500	Koramil Maospati
3	Bantuan untuk masjid dan mushola	Pembelian sarana dakwah Mushola Al Hikmah	300	Desa Balegondo Ngariboyo
4	Bantuan untuk masjid dan mushola	Pembangunan Mushola Al Hidayah	500	Desa Paron Ngawi
5	Sponsorship olahraga	Turnamen Futsal PFA Magetan FC	300	Futsal PFA Magetan FC



6	Bakti Sosial	Bantuan Pengobatan	1.000	SMK 1 Poncol ( Cristina Della )
7	Bakti Sosial	Bantuan tuna wreda	500.000	Yayasan Wiradaksa Utama Kab Magetan

**XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2020**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2,12	Baik	PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja
ANALISIS		
PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap</li><li>2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap</li><li>3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap</li></ol>		



#### **XVIII PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, Terima Kasih.

**MAGETAN, 23 April 2021**

Pengurus PT. BPR Ekadharma  
Bhinaraharja

**Drs. Hariyadi , MM**  
Komisaris Utama

**MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE**  
Direktur Utama



**PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA**  
**JL RAYA JARANAN DESA NGADIREJO KECAMATAN**  
**KAWEDANAN**  
**MAGETAN**  
Telp. 0351439872, Fax. 0351438999


#### **XVIII PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharm Bhinaraharja, Terima Kasih.



**Drs. Hariyadi , MM**  
Komisaris Utama

**MAGETAN, 21 April 2021**  
Pengurus PT. BPR Ekadharm  
Bhinaraharja



**MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE**  
Direktur Utama